

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, 2006, Hukum Pidana Internasional 2, Restu Agung, Jakarta.
- Asshididiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli, 2002, Masalah Pengaturan Terorisme Dalam Perspektif Indonesia, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Barber, Benjamin. 1995. Jihad vs. McWorld. New York: Times Books.
- Hartono, Sunaryati. 2006 Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni.
- Ifdal, Kashim. 2002. "Prinsip-prinsip Van Boven, Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat", Jakarta: Elsam.
- Joni, Muhammad. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung : Citra Aditya
- Kleden, Marianus. 2008. Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal. Yogyakarta: Lamamera
- Mantra, Ida Bagus. 2004. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Nainggolan, Poltak Portagi. 2002. Terorisme Dan Tata Dunia Baru, Sekjen DPR RI, Jakarta.

Nance, M. W. 2003. Terrorist Recognition Handbook. Florida: CRC Press Taylor & Francis Group.

Pratomo, Eddy. 2018. Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: PT Flex Media Komputindo.

Purwanto, Wawan H, 2004, Terorisme Dan Ancaman Tiada Akhir, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.

Ramdani, Febri. 2020. 300 Hari di Bumi Syam. Jakarta: Pustaka Harakatuna.

Ruba'i, Masruchin. 2001. Asas-Asas Hukum. Malang: UM PRESS.

Rubenstein, Kim dan Daniel Adler. 2000. International Citizenship: The Future of Nationality in a Globalized World, tanpa penerbit

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. 2004. Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum. Bandung: Refika Aditama.

Winarta, Frans H. 2004. "Terorisme Itu Kejahatan Luar Biasa", dalam Rudhy Suharto, Wihaji PWH, Chamad Hojin (ed). Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi, Cet. 1, Jakarta: Matapena.

Peraturan Perundang-undangan

Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women
(CEDAW)

Convention on The Right of The Child (CRC)

International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(ICERD)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR)

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933

Resolusi DK PBB 2249 dan 2368

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Jurnal/Artikel

Akbar, Taufik, dkk. 2020. Potensi Ancaman Asimetris Pada *Foreign Fighter Returnees* di Indonesia. *Politica* Vol. 11 No. 2 November 2020

Amaliyah, Suci dan Boy Anugerah. 2020. Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan Wni Eks-Isis. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* | Edisi 41 | Maret 2020. file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/12-Article%20Text-15-1-10-20200716-2.pdf

Ariadno, Melda Kamil. 2008. “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional”. *Indonesian Journal of International Law*, Volume 5 No.3.

Beyer, Cornelia. 2008. “Understanding and Explaining International Terrorism: On the Interrelation between Human and Global Security”. *Human Security Journal*, Vol. 7, Summer 2008.

Erlies S. 2018. Kewajiban Indonesia Berdasarkan Ketentuan yang Bersamaan Konvensi Jenewa 1949, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 33 No.3. Diakses dari <http://mimbaropini.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2149>, diakses pada 26 Oktober 2020.

Firmansyah, Heri. 2011. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *MIMBAR HUKUM* Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.

Galingging, Ridarson. 2002. “Universal Jurisdiction in Absentia *Congo v. Belgium, ICJ, Feb.14, 2002”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2002.

Jailani, Muhammad. 2010. "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Vol.13, No.1. Diakses dari https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/651, pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 19.45 WIB.

Kencana, IGSN dan I Ketut Sudiarta. 2015. Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung Isis (*Islamic State Of Iraq And Syria*). Bagian Hukum Penyelenggara Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id>, pada tanggal 17 Maret 2021, pukul 13.11 WIB.

Kiroh, Gerald Bachtiar. 2020. Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Mantan Anggota Isis (Islamic State Irak and Syria) Berdasarkan Pasal 28d Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Diakses dari <http://repository.untagsby.ac.id/8352/6/JURNAL%20SKRIPSI%20GERALD%20B.%20KIROH%20%281311600009%29.pdf>

Kuijck, Christina van. 2015. "Terrorism, Foreign Fighters and Deprivation of Nationality", journal Tilsburg University

Jamil, Nuraida. 2014. Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW. Volume 6, Nomor 2.

Lukman, Nathania Agatha dan I Wayan Parsa. 2019. Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan Isis. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id>, pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11.33 WIB.

Muhamad, Simela Victor. 2002. "Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengatasi Masalah Terorisme", dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed); Terorisme dan

Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.

Nababan, Asmara. 2004. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Belajar dari Pengalaman", *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Vol.2 N0.2, November 2004.

Nasution, Aulia Rosa. 2015. Terorisme Di Abad Ke -21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perpektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia. Universitas Medan Area: Jurnal Mercatoria. Vol 8 No 1/Juni 2015

Savun, Burcu dan Brian J. Phillips. 2009. "Democray, Foreign Policy and Terrorism", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 20, No. 10, 2009.

Sen, Amartya. 2008 "Violence, Identity, and Poverty". *Journal of Peace Research*, Vol. 45, No. 1, 2008.

Schulze, Kirsten E. 2018. "The Surabaya Bombings and the Evolution of the Jihadi Treat in Indonesia." *CTC Sentinel*.

Tucker, Jason. 2014. "Questioning de facto Statelessness by Looking at De facto Citizenship". *Tilburg Law Review*.

United Nations, 2007. *The United Nations Today*. New York: United Nations Department of Public Information.

Internet

Arief, Akbar Mohammad. 2020. "Terorisme dan Anak-Anak". Diakses dari <https://projectchild.ngo/blog/2020/01/15/terorisme-dan-anak-anak/>, pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 07.54 WIB.

BBC. 2020. WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia: Saya Sangat Lelah, Saya Sangat Berterima Kasih Jika Menerima Kami Pulang, Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>, pada tanggal 19 April 2021, pukul 18.14 WIB.

DetikNews. 2018. Kisah Perempuan Yazidi Lepas dari Perbudakan Seksual ISIS. Diakses dari <https://news.detik.com/abc-australia/d-3906916/kisah-perempuan-yazidi-lepas-dari-perbudakan-seksual-isis>, pada tanggal 30 Desember 2020, pukul 19.44 WIB.

Herlambang, Adib Auliawan. 2020. Ini 6 Potensi yang Terjadi Jika WNI eks ISIS Dipulangkan. Diakses dari <https://www.ayosemarang.com/read/2020/02/10/52004/ini-6-potensi-yang-terjadi-jika-wni-eks-isis-dipulangkan>, pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 17.33 WIB.

Human Rights Papua. 2016. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik. Diakses dari <https://humanrightspapua.org/resources/intllaw/159-kovenan-internasional-hak-hak-sipil-dan-politik>, pada tanggal 18 Januari 2021, pukul 18.13 WIB.

Hutagalung, Nurina Vidya. 2020. "Penanganan Anak Simpatisan ISIS". Diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1308827/penanganan-anaksimpatisan-isis>, pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 18.37 WIB.

Iswinarno, Chandra dan Erick Tanjung. 2020. Pemerintah Tolak Pemulangan 600 WNI Eks-ISIS, Bagaimana Nasib Anak Mereka?. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/02/14/202604/pemerintah-tolak->

pemulangan-600-wni-eks-, pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 11.35 WIB.

Kemlu. 2019. Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme. Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme, pada tanggal 19 Februari 2021, pukul 13.31 WIB.

Kirandita, Patresia. 2020. Merenungkan Nasib Perempuan dan Anak di Kamp Pengungsian ISIS. Diakses dari <https://magdalene.co/story/merenungkan-nasib-perempuan-dan-anak-di-kamp-pengungsian-isi>, pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 14.14 WIB.

Kompasiana. 2015. ISIS, Ancaman Terorisme dan Masa Depan NKRI. Diakses dari <http://hankam.kompasiana.com/2015/01/08/isisancaman-terorisme-dan-masa-depan-nkri715344.html>, pada tanggal 30 Desember 2020, pukul 07.34 WIB.

Krähenmann, Sandra dan Paulien Vandendriessche. 2019. "From Child Soldier to Child 'Terrorist': Safeguarding Innocence from Counter-terrorism", Diakses dari <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/11/20/child-soldier-counterterrorism/>, pada tanggal 16 April 2021, pukul 15.43 WIB.

Massey, Hugh. 2010, "UNHCR and De Facto Statelessness", UNCHR Legal and Protection Policy Research series. Diakses dari <https://www.unhcr.org/4bc2ddeb9.pdf>, pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 19.25 WIB.

Muchlishon. 2020. PBB Desak Pemulangan Anak-anak Militan ISIS. Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/115620/pbb-desak-pemulangan-anak-anak-militan-isis>, pada tanggal 06 Maret 2021, pukul 13.54 WIB.

Noor. 2012. “Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional”, Diakses dari <http://www.negarahukum.com/negara-sebagai-subyek-hukum-internasional.html>, pada tanggal 17 Februari 2021, pukul 08.34 WIB.

Nuha, Ulin. 2021. Menyelamatkan Perempuan dari Jeratan Paham Radikal Ulin Nuha: Diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/400359/menyelamatkan-perempuan-dari-jeratan-paham-radikal>, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 19.40 WIB.

Prastiwi, Devira. 2020. Pro Kontra Pemulangan 600 WNI Eks ISIS ke Indonesia. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4172972/pro-kontra-pemulangan-600-wni-eks-isis-ke-indonesia>, pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 17.47 WIB.

Permono, Prakoso. 2019. “Setelah Kematian al-Baghdadi”. Artikel opini di Portal detik.com. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4768830/setelah-kematian-al-baghdadi>, pada tanggal 23 Januari 2021, pukul 16.42 WIB.

Puspita, Ratna. 2020. Pakar: Pemerintah Perlu Aturan Khusus Soal WNI Eks ISIS. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/q5fuib428/pakar-pemerintah-perlu-aturan-khusus-soal-wni-eks-isis>, pada tanggal 10 Februari 2021, pukul 18.14 WIB.

Ramadhan, Alam Anugrah dan Fadhlan Naufal Aditya. 2020. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Pemulangan Wni Eks-Isis: Antara Hukum, Kemanusiaan Dan Stabilitas Keamanan Nasional.

Rosmala, Dian. 2020. Terkait WNI Eks ISIS, Amnesty International: Negara Wajib Melindungi Hak Kewarganegaraan Mereka. Diakses dari <https://akurat.co/news/id-1005456-read-terkait-wni-eks-isis-amnesty-international-negara-wajib-melindungi-hak-kewarganegaraan-mereka>, pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17.34 WIB.

Sadikin, Rendy Adrikni, dan Rifan Aditya. 2020. Usai Ikut Deradikalisasi, Pasutri WNI Malah Jadi Bomber ISIS di Filipina. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/02/08/174626/usai-ikut-deradikalisasi-pasutri-wni-malah-jadi-bomber-isis-di-filipina?page=all>, pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 13.34 WIB.

Saraswati, Nanda. 2020. Kembalinya Eks-ISIS: Antara Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM. Diakses dari <https://crcs.ugm.ac.id/kembalinya-eks-isis-antara-keamanan-nasional-dan-perlindungan-ham/>, pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 18.44 WIB.

Soetriadi, Ewit. 2008. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 17-18, <http://core.ac.uk/download/pdf/11717023.pdf>, diakses 19 Februari 2021, pukul 19.05 WIB.

Sumawiharja, Farhan Arif & Adis Imam Ismunandar. 2020. Analisa Kebijakan
Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah. Jurnal Keamanan
Nasional Volume VI, No. 1, Mei 2020

United Nations High Commissioner for Refugees. 2013. Expert Meeting:
Interpreting the 1961 Statelessness Convention and
Avoiding Statelessness Resulting from Loss and Deprivation of
Nationality Convened. Diakses dari
<https://www.refworld.org/pdfid/533a754b4.pdf>, pada tanggal 09 April
2021, pukul 08.49 WIB.

UN Human Rights Committee (HRC). 1989. "CCPR General Comment No. 17:
Article 24 (Rights of the Child)". Diakses dari
<http://www.refworld.org/docid/45139b464.html>, pada tanggal 29 Maret
2021, pukul 09.45 WIB.

UN High Commissioner for Refugees. 2014. "Nationality and Statelessness:
Handbook for Parliamentarians N° 22". Diakses dari
<https://www.refworld.org/docid/53d0a0974.html>, pada tanggal 21 Maret
2021, pukul 19.15 WIB.